

Komparasi Kebijakan dan Standar Operasional Pengelolaan Deposito dan Giro pada PT. BRI Tbk dan PT. BNI Tbk (2022-2024)

Ayuk Rahmawati, Khaifa Khusnul otimah, Erna Chotidjah Suhatmi
S1 Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mngun Sarkoro No. 20, kec. Bnajarsari, kota Surakarta, Jawa Tengah ,57135
Telp. (0271) 7470550
E-mail: ayurahmawati0804@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan deposito dan giro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama periode 2022–2024, dalam konteks regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumentasi terhadap regulasi OJK dan BI, laporan tahunan, laporan manajemen risiko, serta dokumen operasional kedua bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan deposito pada kedua bank dipengaruhi terutama oleh kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) dan ketentuan likuiditas makroprudensial lainnya, sementara pengelolaan giro mengikuti ketentuan PBI No. 24/19/PBI/2022 mengenai Rekening Giro di BI dan regulasi kliring nasional. Secara komparatif, BRI memiliki struktur pendanaan yang lebih stabil karena dominasi nasabah ritel dan UMKM, sehingga SOP lebih menekankan konsistensi arus dana dan volume transaksi tinggi bernominal kecil. Sebaliknya, BNI mengelola dana korporasi dan institusi dengan nilai besar sehingga menghadapi risiko konsentrasi dana dan volatilitas likuiditas yang lebih tinggi, yang menuntut SOP yang lebih ketat dan monitoring transaksi intraday. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan struktur nasabah merupakan faktor utama yang membedakan strategi operasional kedua bank, sedangkan regulasi berfungsi sebagai kerangka dasar yang berlaku seragam bagi seluruh perbankan

Kata Kunci: deposito, giro, regulasi perbankan, likuiditas bank, kebijakan operasional

Abstract

This study aims to analyze and compare the policies and Standard Operating Procedures (SOPs) for managing deposits and current accounts at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk during the 2022–2024 period, within the context of regulations established by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI). The research method used is descriptive qualitative, with documentation studies of OJK and BI regulations, annual reports, risk management reports, and operational documents of both banks. The results show that deposit management at both banks is primarily influenced by the Minimum Reserve Requirement (GWM) policy and other macroprudential liquidity provisions, while current account management follows the provisions of PBI No. 24/19/PBI/2022 concerning Current Accounts at BI and national clearing regulations. Comparatively, BRI has a more stable funding structure due to the dominance of retail and MSME customers, so its SOP emphasizes consistent cash flow and high transaction volumes with small denominations. In contrast, BNI manages substantial corporate and institutional funds, thus facing higher risks of fund concentration and liquidity volatility, which require stricter SOPs and intraday transaction monitoring. The findings of this study confirm that differences in customer structure are the primary factor distinguishing the operational strategies of the two banks, while regulations serve as a uniform framework for all banks.

Keywords: deposits, current accounts, banking regulations, bank liquidity, operational policies

1. Pendahuluan

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) merupakan aktivitas inti perbankan yang berfungsi menjaga likuiditas dan mendukung ekspansi kredit. Dua instrumen yang paling berperan dalam

struktur DPK adalah deposito dan giro, karena menjadi sumber dana stabil dan memiliki karakteristik berbeda terkait motif simpanan nasabah. Menurut Kasmir (2018), deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian, sedangkan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan melalui cek atau bilyet giro. Kedua instrumen tersebut memiliki implikasi langsung terhadap likuiditas bank, struktur biaya dana (*cost of fund*), serta preferensi nasabah antara manfaat bunga dan fleksibilitas transaksi (Darmawi, 2019).

Dalam operasionalnya, produk deposito dan giro berada di bawah kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Periode 2022–2024 ditandai oleh penerapan regulasi penting, termasuk ketentuan perlindungan konsumen, transparansi informasi produk, serta pengaturan likuiditas bank melalui Giro Wajib Minimum (GWM). Regulasi tersebut mengarahkan bank agar memberikan informasi produk yang jelas, mengelola risiko likuiditas, serta menjaga keamanan dana nasabah. Menurut Ismail (2020), regulasi perbankan berfungsi memastikan stabilitas sistem keuangan dan mendorong keseragaman standar operasional bank dalam mengelola simpanan masyarakat.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) merupakan dua bank BUMN dengan skala nasional yang memiliki pangsa DPK terbesar di Indonesia. Meski beroperasi dalam kerangka regulasi yang sama, kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan kedua bank dalam pengelolaan deposito dan giro dapat berbeda karena dipengaruhi orientasi bisnis, segmen nasabah dominan, serta strategi manajemen likuiditas masing-masing bank. Penelitian sebelumnya oleh Suryani & Wibowo (2021) menunjukkan bahwa bank dapat mengembangkan kebijakan produk yang berbeda meskipun tunduk pada regulasi yang sama, tergantung fokus pasar dan strategi kompetitifnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan:

- 1) Apa saja regulasi OJK dan BI yang mengatur pengelolaan deposito pada periode 2022–2024?
- 2) Apa saja regulasi OJK dan BI yang mengatur pengelolaan giro pada periode 2022–2024?
- 3) Bagaimana komparasi kebijakan dan SOP pengelolaan deposito antara BRI dan BNI?, dan
- 4) Bagaimana komparasi kebijakan dan SOP pengelolaan giro antara BRI dan BNI?

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi regulasi yang relevan, menganalisis kebijakan kedua bank, serta membandingkan SOP operasional deposito dan giro pada BRI dan BNI. Untuk memecahkan masalah penelitian, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap regulasi OJK–BI, laporan tahunan kedua bank, serta dokumen resmi terkait produk simpanan. Analisis dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan strategi pengelolaan simpanan pada masing-masing bank.

Tinjauan pustaka mengenai konsep deposito, giro, regulasi simpanan, dan kebijakan perbankan digunakan untuk memperkuat landasan teoretis penelitian. Literatur tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pengelolaan produk simpanan antar bank dapat muncul karena perbedaan orientasi pasar, struktur risiko, dan strategi likuiditas (Ismail, 2020; Kasmir, 2018; Darmawi, 2019; Suryani & Wibowo, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan simpanan pada dua bank besar nasional dalam konteks regulasi periode 2022–2024.

2. Metodologi

2.1 Rancangan kegiatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan deposito dan giro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama periode 2022–2024. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada interpretasi mendalam terhadap isi regulasi serta dokumen kebijakan internal bank, bukan pada pengujian statistik. Ruang lingkup penelitian mencakup identifikasi dan analisis regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang relevan dengan pengelolaan deposito dan giro, serta kajian terhadap

kebijakan operasional dan SOP kedua bank sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan, laporan manajemen risiko, dan dokumen publik lainnya yang dipublikasikan oleh masing-masing bank.

2.2 Jenis dan sumber data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yang bersumber dari dokumen resmi seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), serta Peraturan OJK (POJK) yang berlaku pada rentang 2022–2024. Selain itu, data diperoleh dari *annual report*, paparan publik, publikasi tata kelola (GCG), serta laporan manajemen risiko BRI dan BNI. Literatur akademik berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah mengenai likuiditas, dana pihak ketiga, dan manajemen perbankan juga digunakan sebagai pijakan teoritis dalam mendukung analisis.

2.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh regulasi, dokumen operasional, serta laporan resmi yang berkaitan dengan deposito, giro, dan manajemen likuiditas. Pengumpulan data juga diperkuat melalui kajian literatur yang memberikan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkaya pemahaman tentang praktik pengelolaan deposito dan giro. Semua dokumen dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi ketentuan inti, perubahan kebijakan, serta implikasinya bagi operasional bank.

2.3 Teknik analisis data

Regulasi dan dokumen bank dianalisis setelah, penelitian dilanjutkan dengan analisis komparatif yaitu membandingkan kebijakan dan SOP pengelolaan deposito serta giro antara BRI dan BNI. Perbandingan dilakukan terhadap aspek struktur kebijakan pendanaan, mekanisme pengelolaan likuiditas, pemenuhan GWM, stabilitas dana, serta prosedur operasional harian terkait transaksi giro dan deposito. Hasil analisis ini kemudian disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan terarah mengenai bagaimana kedua bank menyesuaikan kebijakan dan SOP mereka dalam merespons regulasi selama periode penelitian.

Penelitian mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai kesesuaian kebijakan perbankan dengan regulasi yang berlaku, serta perbedaan nyata dalam implementasi SOP pengelolaan deposito dan giro pada BRI dan BNI. Pendekatan kualitatif deskriptif dipandang paling tepat karena dapat menggambarkan dinamika kebijakan dan praktik operasional bank secara komprehensif sesuai fokus penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis regulasi OJK dan Bank Indonesia (BI), laporan tahunan bank, serta dokumen operasional yang dipublikasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama periode 2022–2024. Pembahasan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan secara logis serta mengaitkannya dengan teori manajemen likuiditas dan dana pihak ketiga.

1) Regulasi OJK dan BI Terkait Pengelolaan Deposito (2022–2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2022–2024 tidak terdapat regulasi OJK yang secara khusus mengatur mekanisme teknis deposito bank. Namun demikian, terdapat sejumlah regulasi makroprudensial yang memengaruhi strategi pengelolaan deposito, terutama terkait likuiditas dan kecukupan modal. Regulasi Bank Indonesia yang berdampak langsung antara lain PBI No. 24/4/PBI/2022 mengenai kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) serta PADG No. 2/2023 yang mengatur mekanisme insentif pemenuhan GWM. Regulasi ini menentukan besaran dana stabil yang harus dipelihara bank sehingga berimplikasi pada kebijakan penentuan tenor, suku bunga, serta strategi penghimpunan deposito.

Teori Kasmir (2018) yang menyatakan bahwa deposito merupakan instrumen dana berjangka yang sangat penting dalam menjaga stabilitas pendanaan bank. Dengan adanya ketentuan GWM

dan kebijakan makroprudensial, bank harus menyeimbangkan antara kebutuhan cadangan likuiditas dan kesiapan dana jangka menengah.

2) Regulasi OJK dan BI Terkait Pengelolaan Giro (2022–2024)

Berbeda dengan deposito, giro memiliki regulasi yang lebih komprehensif. Hasil penelitian, regulasi utama yang mengatur pengelolaan giro adalah PBI No. 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia, yang memuat ketentuan penyetoran, penarikan, saldo minimum, serta tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening giro BI. Regulasi lainnya adalah PBI No. 24/4/PBI/2022 mengenai porsi GWM yang wajib dipenuhi dari dana giro. Selain itu, ketentuan operasi moneter juga mewajibkan bank peserta memiliki rekening giro Rupiah di BI.

Ketentuan ini mendukung pernyataan Siamat (2019) bahwa giro merupakan sumber dana yang sangat likuid sehingga pengelolaannya harus mengikuti standar kehati-hatian yang ketat. Dengan regulasi yang jelas, bank memiliki pedoman operasional dalam menjaga likuiditas intraday dan menjamin kelancaran transaksi pembayaran.

3) Komparasi Kebijakan Pengelolaan Deposito BRI dan BNI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan deposito pada BRI dan BNI dipengaruhi oleh struktur nasabah dan profil pendanaan yang berbeda. BRI memiliki basis nasabah ritel dan UMKM, sehingga deposito yang dihimpun cenderung bernilai kecil namun memiliki jumlah rekening yang besar. Sementara itu, BNI memiliki basis dana institusional dan korporasi dengan kecenderungan deposito bernominal besar.

Tabel 1. Perbandingan Strategi Pengelolaan Deposito BRI dan BNI

Aspek	BRI	BNI
Profil nasabah	Ritel & UMKM	Korporasi & institusi
Pola deposito	Nominal kecil, volume besar	Nominal besar, volume kecil
Risiko konsentrasi	Rendah	Tinggi
Sensitivitas suku bunga	Rendah	Tinggi
Fokus SOP	Stabilitas dana ritel	Pengendalian deposito jumbo

Perbedaan struktur ini menyebabkan BNI harus menerapkan kebijakan suku bunga yang lebih fleksibel untuk mempertahankan deposito besar, sedangkan BRI lebih menekankan pada stabilitas dan keberlanjutan dana ritel. Temuan ini konsisten dengan Wibowo dan Sihombing (2020), yang menyatakan bahwa dana korporasi memiliki sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi pasar sehingga memerlukan kebijakan pendanaan yang adaptif.

4) Komparasi Kebijakan Pengelolaan Giro BRI dan BNI

Analisis terhadap laporan operasional menunjukkan bahwa transaksi giro BRI didominasi oleh nasabah ritel dengan frekuensi tinggi tetapi nominal kecil. Sementara itu, BNI memiliki transaksi giro korporasi bernilai besar dan fluktuatif. Kondisi ini mempengaruhi pola pengelolaan likuiditas harian dan SOP layanan giro

Tabel 2. Perbandingan Pengelolaan Giro BRI dan BNI

Aspek	BRI	BNI
Dominasi transaksi	Ritel	Korporasi
Jumlah transaksi	Banyak	Relatif sedikit
Nominal transaksi	Rendah	Tinggi
Stabilitas arus dana	Stabil	Fluktuatif
Fokus SOP	Clearing harian ritel	Rekonsiliasi transaksi besa onitoring intraday

Temuan ini menunjukkan bahwa BRI memiliki kestabilan lebih tinggi dalam pengelolaan giro karena tingginya volume transaksi ritel yang konsisten. Sebaliknya, BNI menghadapi volatilitas likuiditas yang lebih tinggi akibat dominasi dana korporasi, sehingga memerlukan SOP pengendalian risiko yang lebih kompleks. Hal ini sejalan dengan teori Parasuraman et al. (1990) mengenai risiko operasional pada transaksi bernominal besar.

Pembahasan

Hasil penelitian secara keseluruhan menegaskan bahwa regulasi BI berperan dominan dalam membentuk kebijakan dan operasional pengelolaan giro dan deposito. Namun, implementasi pada masing-masing bank ditentukan oleh karakteristik struktur dana. BRI lebih stabil dalam penghimpunan deposito dan pengelolaan giro karena dominasi nasabah ritel, sedangkan BNI lebih dinamis dan berisiko tinggi sehingga memerlukan SOP lebih formal, pengawasan lebih ketat, dan koordinasi intensif dengan unit treasury.

Interpretasi ini menguatkan konsep manajemen likuiditas dalam literatur perbankan, yaitu bahwa keberhasilan pengelolaan DPK sangat dipengaruhi oleh struktur sumber dana dan lingkungan regulasi (Hansen & Mowen, 2007).

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan deposito dan giro pada perbankan sangat dipengaruhi oleh regulasi makroprudensial yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada periode 2022–2024, pengaturan deposito dipengaruhi terutama oleh kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) dan ketentuan insentif likuiditas, sedangkan pengelolaan giro diatur secara lebih rinci melalui PBI mengenai Rekening Giro di BI. Regulasi tersebut membentuk kerangka operasional yang harus dipatuhi oleh seluruh bank dalam menjaga kecukupan dan stabilitas likuiditas.

Hasil perbandingan antara BRI dan BNI menunjukkan bahwa meskipun kedua bank beroperasi di bawah regulasi yang sama, implementasi kebijakan dan SOP berbeda sesuai struktur pendanaan dan profil nasabah. BRI, dengan basis nasabah ritel dan UMKM, memiliki pola dana yang lebih stabil baik pada deposito maupun giro. Hal ini membuat SOP pengelolaan lebih terfokus pada volume transaksi tinggi bernominal kecil. Sebaliknya, BNI memiliki ketergantungan lebih besar pada dana korporasi dan institusi, sehingga menghadapi risiko konsentrasi dana yang lebih tinggi dan fluktuasi likuiditas yang lebih signifikan. Kondisi tersebut mengharuskan BNI menerapkan SOP yang lebih ketat, terutama dalam pengawasan transaksi giro bernominal besar dan negosiasi deposito jumbo.

Penelitian ini secara keseluruhan menegaskan bahwa perbedaan struktur nasabah merupakan faktor utama yang membedakan strategi dan prosedur pengelolaan deposito dan giro pada kedua bank, bukan perbedaan regulasi. Regulasi hanya berfungsi sebagai kerangka dasar, sedangkan implementasi operasional ditentukan oleh kebutuhan bisnis dan profil likuiditas masing-masing bank.

Saran

Pengelolaan likuiditas pada BRI dan BNI perlu terus diarahkan pada penguatan sistem berbasis teknologi informasi yang mampu memantau dan memprediksi pergerakan arus dana secara *real time*. Kebutuhan ini menjadi semakin penting, khususnya bagi BNI, mengingat karakteristik transaksinya yang cenderung lebih fluktuatif. Di sisi lain, BRI dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kestabilan dana ritel, yang dapat dilakukan melalui pengembangan produk deposito digital dan giro ritel secara berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berpotensi memperluas jangkauan nasabah, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan bank terhadap kebijakan penyesuaian suku bunga dalam menghimpun dana.

Selain itu, struktur pendanaan BNI perlu diarahkan pada diversifikasi yang lebih seimbang dengan memperkuat kontribusi segmen ritel dan komersial. Strategi ini bertujuan untuk menekan risiko konsentrasi dana yang bersumber dari nasabah korporasi serta mendukung prinsip manajemen likuiditas yang mengutamakan sumber pendanaan yang stabil. BRI dan BNI juga dituntut untuk secara berkala menyesuaikan Standar Operasional Prosedur dengan perubahan regulasi dan kondisi pasar yang dinamis. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan terkait pengelolaan deposito, giro, dan risiko likuiditas menjadi faktor pendukung penting agar penerapan SOP dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, pengembangan

penelitian di masa mendatang dapat dilakukan dengan memperluas cakupan objek kajian, misalnya dengan melibatkan bank swasta nasional atau menggabungkan pendekatan kualitatif dengan analisis kuantitatif terhadap indikator likuiditas seperti LDR, NSFR, dan LCR, sehingga pemahaman mengenai dampak kebijakan pengelolaan dana dapat diperoleh secara lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. 2022. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2023. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PADG 24/8/PADG/2022*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BRI. 2023. *Annual Report PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2023*. Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia.
- BNI. 2023. *Annual Report PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2023*. Jakarta: PT Bank Negara Indonesia.
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen perbankan*. Bumi Aksara.
- Hansen, D.R., dan Mowen, M.M. 2007. *Cost Management: Accounting and Control*. Ohio: Thomson South-Western.
- Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Kasmir, M. P. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.
- Kasmir. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. Jakarta: OJK.
- Pratama, B. A. (2010). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., dan Berry, L.L. 1990. *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. New York: Free Press.
- Siamat, Dahlan. 2019. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Tarigan, R. dan Siregar, M. 2021. "Analisis Pengelolaan Likuiditas Perbankan di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 115–129.
- Wibowo, A. dan Sihombing, R. 2020. "Pengaruh Kebijakan GWM terhadap Stabilitas Likuiditas Bank Umum di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 233–245.